

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Metode Penelitian yang digunakan**

##### **1.1.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan.

Menurut Sugiyono (2017:3) definisi metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, tujuan dan kegunaan”.

Menurut Priyono (2016:1) definisi metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat menunjukkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam melakukan hal tersebut maka dibutuhkan

sebuah data dan informasi yang terkait dengan masalah tersebut agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam peneliti ini.

Dalam melakukan peneliti, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif dengan penelitian *survey*. Menurut Sugiyono (2017:8) yang dimaksud dengan metode kuantitatif adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada firasat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiyono (2017) definisi penelitian *survey* adalah sebagai berikut:

“Metode *survey* yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam mengumpulkan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen)”.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### **1.1.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam melakukan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari sebuah permasalahan yang sedang terjadi. Sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian, maka objek penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran semua data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian.

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian ini adalah pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.

### **1.1.3 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas bagaimana gambaran mengenai objek yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2015:206) definisi metode deskriptif adalah sebagai berikut:

“Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

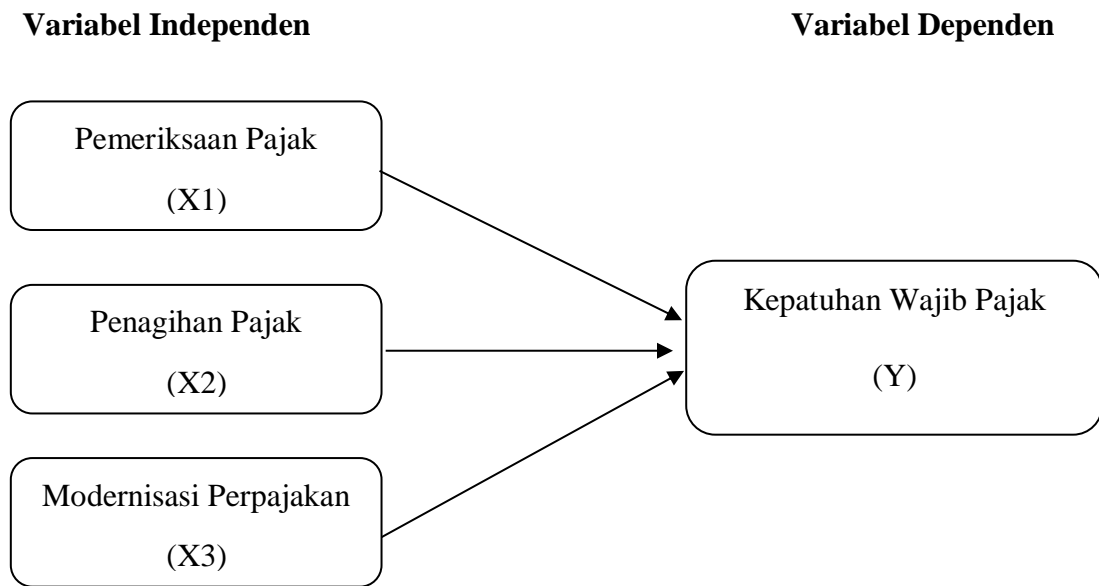
Menurut Sugiyono (2017) definisi metode verifikatif adalah sebagai berikut:

“Penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Penelitian verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji hipotesis yaitu dengan uji t (parsial) dan uji F (simultan).

#### **1.1.4 Model Penelitian**

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan yaitu: “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” maka untuk menggambarkan model penelitian antara variabel independen dan variabel dependen, penulis memberikan model penelitian yang dapat dilihat dalam gambar 3.1 sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Model Penelitian**

### 1.1.5 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:102) yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

“Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.

Instrumen penelitian ini digunakan sebagai alat pengumpulan data, dan digunakan instrumen yang lazim digunakan dalam penelitian adalah beberapa daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian pada saat observasi.

Dalam penelitian ini, operasionalisasi variabel secara spesifik peneliti menggunakan skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk memberikan informasi nilai pada jawaban. Setiap variabel penelitian diukur dengan menggunakan instrumen pengukur dalam bentuk kuesioner berskala ordinal yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe Skala *Likert*.

Menurut Sugiyono (2017:93) yang dimaksud dengan Skala *Likert* adalah sebagai berikut:

“Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam menggunakan penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian”.

**Tabel 3.1**

**Tabel Scoring**

Pertanyaan	Jawaban (Skor)	
	Positif (+)	Negatif (-)
Sangat Setuju/Setuju/Selalu/Sangat Sesuai	5	1
Setuju/Sering/Sesuai	4	2
Ragu-Ragu/Kadang-Kadang/Netral	3	3
Tidak Setuju/Hampir Tidak Pernah/Tidak Sesuai	2	4
Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Sangat Tidak Sesuai	1	5

## **1.2 Definisi Variabel dan Operasional Variabel Penelitian**

### **1.2.1 Definisi Variabel Penelitian**

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum dimuali pengumpulan data. Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:38) adalah sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Maka penulis mengelompokkan variabel-variabel dalam judul tersebut dalam 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependen variabel*). Variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.2.1.1 Variabel Bebas (Independen Variabel)**

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Menurut Sugiyono (2017:39) variabel Independen adalah sebagai berikut:

“Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (*dependen variabel*)”.

Maka dalam penelitian ini Variabel bebas dinotasikan sebagai X dan ada tiga yang menjadi variabel bebas yaitu antara lain:

**a. Pemeriksaan Pajak (X<sub>1</sub>)**

Menurut Rahayu (2017:257) definisi pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak yaitu tahapan pemeriksaan pajak. Menurut Rahayu (2017) tahapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. **Persiapan Pemeriksaan Pajak**  
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mempelajari berkas wajib pajak
  - b. Menganalisis SPT
  - c. Menganalisis laporan keuangan wajib pajak
  - d. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
2. **Pelaksanaan Pemeriksaan**  
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
  - a. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal
  - b. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen
  - c. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
3. **Laporan Hasil pemeriksaan**  
 Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir laporan pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
  - a. Laporan pemeriksaan disusun secara jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan yang didukung oleh temuan yang kuat



- b. Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan penyimpangan SPT disusun dengan memperhatikan kertas kerja pemeriksaan
- c. Laporan pemeriksaan didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

## **b. Penagihan Pajak (X<sub>2</sub>)**

Menurut Rahayu (2013:197) definisi penagihan pajak adalah sebagai berikut:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan dengan kewajiban pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan berlaku”.

Dimensi yang digunakan untuk mengukur penagihan pajak yaitu tindakan penagihan pajak. Menurut Rahayu (2013:198,202) tindakan penagihan pajak adalah sebagai berikut:

### **1. Penagihan seketika dan sekaligus**

Penagihan seketika dan sekaligus adalah suatu peristiwa atau keadaan dalam rangka pengamanan penerimaan sektor pajak. Fiskus diberikan wewenang untuk menerbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus walaupun belum jatuh tempo pembayaran atas kuasa.

Penagihan seketika dan sekaligus hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan yang ditentukan pada:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau beniat untuk itu.
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

### **2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

- a. Penerbitan surat teguran

- b. Penerbitan surat paksa
- c. Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan
- d. Perintah jadwal waktu pelelangan
- e. Pengumuman dan pelaksanaan lelang.

### c. Modernisasi Perpajakan (X<sub>3</sub>)

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah retribusi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi dan sumber daya yang ada di Indonesia.

Menurut Rahayu (2013:110) Dimensi yang digunakan untuk mengukur modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

##### a. *Job des* Kantor Pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (*Center of Policy Making and Analysis*) atau hanya menjelaskan tugas dan pekerjaan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang *business process*, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk ini struktur KP DJP dibagi menjadi:

- Direktorat yang menangani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat)
- Direktorat yang menangani perkembangan/transformatasi (3 direktorat)
- Untuk memperluas beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta
- Beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*

b. *Job des* Kantor Operasional

Kantor operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan wajib pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, stuktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak, khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai
- b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filling* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Diharapkan ke depannya DJP dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kerja. Langkah perbaikan di bidang SDM yaitu:

- a. DJP melakukan pemetaan kompensasi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai
- b. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut
- c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai
- d. Sebagai catatan pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja
- e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil dan akuntabel.

#### 4. Pelaksanaan *Good Governance*

Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:

- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut
- b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional
- c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal dibawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

#### 1.2.1.2 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsisten. Menurut Sugiyono (2017:39) definisi variabel terikat sebagai berikut:

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”.

Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **1.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasi dan kondisinya tergantung variabel lain. Sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka terdapat empat variabel penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Pajak sebagai variabel bebas ( $X_1$ )
2. Penagihan Pajak sebagai variabel bebas ( $X_2$ )
3. Modernisasi Perpajakan sebagai variabel bebas ( $X_3$ )
4. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat ( $Y$ )

Variabel yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, selanjutnya akan diuraikan dalam variabel, sub-sub variabel, dimensi variabel serta indikator-

indikator yang berkaitan dengan penelitian dan berdasarkan teori yang relevan dengan penelitian. Agar lebih mudah untuk melihat mengenai variabel penelitian yang digunakan maka penulis menjabarkannya ke dalam operasionalisasi. Berikut merupakan penjabaran dari variabel penelitian dalam beberapa dimensi dan indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel Independen**  
**Variabel Independen: Pemeriksaan Pajak (X<sub>1</sub>)**

<b>Operasional variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>	<b>No.</b>
<b>Pemeriksaan Pajak (Variabel X<sub>1</sub>)</b>  Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan	Tahapan Pemeriksaan Pajak:			
	1. Persiapan Pemeriksaan Pajak	a. Mempelajari berkas wajib pajak	Ordinal	1
		b. Menganalisis SPT wajib pajak	Ordinal	2
		c. Menganalisis laporan keuangan wajib pajak	Ordinal	3
		d. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan	Ordinal	4

<p>untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.</p> <p><b>Rahayu (2017:257)</b></p>	2. Pelaksanaan Pemeriksaan	a. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal	Ordinal	5
		b. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen	Ordinal	6
		c. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak	Ordinal	7
	3. Laporan Hasil Pemeriksaan	a. Laporan pemeriksaan disusun secara jelas dan ringkas, memuat kesimpulan yang didukung oleh temuan yang kuat	Ordinal	8-10
		b. Laporan pemeriksaan dalam pengungkapan penyimpangan SPT disusun dengan memperhatikan kertas kerja pemeriksaan	Ordinal	11

		c. Laporan pemeriksaan didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan	Ordinal	12
<b>Sumber: Rahayu (2017)</b>				

Tabel 3.3

## Operasional Variabel Independen

Variabel Independen: Penagihan Pajak (X<sub>2</sub>)

Operasional variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No.
<b>Penagihan Pajak (Variabel X<sub>2</sub>)</b>	Tindakan Penagihan Pajak			
Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruh kewajiban perpajakan yang menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku.	1. Penagihan Seketika dan Sekaligus	a. Penanggung pajak meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya	Ordinal	13
		b. Memindah tangankan barang yang dimiliki/dikuasai	Ordinal	14
		c. Menggabungkan usaha/memekarkan usaha	Ordinal	15
		d. Badan usaha akan dibubarkan Negara	Ordinal	16
Sumber: Rahayu (2013:197)			Ordinal	17



		e. Terjadi penyitaan barang atau terdapat tanda-tanda kepailitan.		
	2. Penagihan Pajak dengan surat paksa	a. Penerbitan Surat Teguran	Ordinal	18
		b. Penerbitan Surat Paksa	Ordinal	19
		c. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Ordinal	20
		d. Perintah jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang negara	Ordinal	21
		e. Pengumuman dan pelaksanaan lelang	Ordinal	22
<b>Sumber: Rahayu (2013: 198)</b>				

Tabel 3.4

## Operasional Variabel Independen

Variabel Independen: Modernisasi Perpajakan ( $X_3$ )

Operasional variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No.
----------------------	---------	-----------	------------------	-----

<b>Modernisasi Perpajakan Variabel (X3)</b>	Dimensi			
Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah retribusi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi dan sumber daya yang ada di Indonesia.	Modernisasi Perpajakan			
	1. Restrukturisasi organisasi	a. Stuktur organisasi berbasis fungsi	Ordinal	23
		b. Debirokratis pelayanan	Ordinal	24
	2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dan manajemen SDM.	a. <i>Standar Operating Procedures (SOP)</i>	Ordinal	25
		b. Penerapan <i>e-system</i>	Ordinal	26
		c. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP)	Ordinal	27
	3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia	a. Melakukan pemetaan kompetensi	Ordinal	28
		b. Seluruh jabatan dievaluasi dan dianalisis	Ordinal	29
		c. Beban kerja dari masing-masing jabatan dianalisis	Ordinal	30
		d. Pembuatan dan dokumentasi SOP	Ordinal	31
	e. Semuanya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir	Ordinal	32	

	4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	a. Pembuatan dan penegakan kode etik pegawai b. Pembentukan <i>complaint center</i>	Ordinal  Ordinal	33  34
<b>Sumber: Rahayu (2013:110)</b>				

Tabel 3.5

## Operasional Variabel Dependen

## Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Operasional variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran	No.
<b>Kepatuhan Wajib Pajak (Variabel Y)</b>  “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela ( <i>voluntary of compliance</i> ) merupakan tulang punggung sistem <i>self assessment</i> , dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan	Jenis – jenis Kepatuhan Wajib Pajak  1. Kepatuhan Formal	a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri	Ordinal	35
		b. Kewajiban mengisi SPT	Ordinal	36
		c. Kewajiban menyampaikan SPT	Ordinal	37
		d. Kewajiban membayar atau menyetor pajak	Ordinal	38
		e. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan	Ordinal	39
		f. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak	Ordinal	40

tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.  Sumber:  Rahayu (2013:13)		g. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak	Ordinal	41
	2. Kepatuhan Material	a. Menyampaikan SPT tahunan dengan jujur dan benar	Ordinal	42
		b. Membayar pajak dengan jujur dan benar	Ordinal	43
		c. Melaporkan pembayaran pajak dengan jujur dan benar	Ordinal	44
<b>Sumber: Suandy (2014:119&amp;120)</b>				

### 1.3 Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80) mendefinisikan bahwa populasi adalah sebagai berikut:

“Dalam penelitian kuantitatif populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Jadi populasi bukan hanya orang, melainkan juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan hanya jumlah yang ada pada objek/subjek yang

dipelajari, tetapi meliputi keseluruhan dari karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut.

Di dalam penelitian ini, populasi penelitiannya adalah subjek yang berhubungan dengan Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Unit observasi/pengamatan pada penelitian ini adalah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya pada *Account Representative (AR)* dan seksi P3, berikut adalah rincian pada tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan jumlah populasi sebagai berikut:

**Tabel 3.6**

**Jumlah Populasi Penelitian**

No	KPP	<i>Account Representative (AR)</i> dan P3
1	Pratama Karawang	11
2	Pratama Cibitung	15
3	Pratama Bekasi Utara	10
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>

Sumber: KPP Pratama ditiga daerah wilayah Jawa Barat

### 1.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) mendefinisikan bahwa sampel adalah sebagai berikut:

“Dalam penelitian kuantitatif sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Pengambilan sampel harus dilakukan sehingga sampel benar-benar dapat mewakili (*AR*) yang dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Sampel digunakan sebagai ukuran dimana ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk mengetahui besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Kemudian besarnya sampel tersebut biasanya diukur secara statistika ataupun estimasi penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang harus dipilih *representative*. Artinya karakteristik dari populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

### 1.3.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81) definisi teknik sampling adalah sebagai berikut:

“Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan”.

Menurut Sugiyono (2017:82) definisi *Probability Sampling* adalah sebagai berikut:

“*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”.

Menurut Sugiyono (2017:84) definisi *Nonprobability Sampling* adalah sebagai berikut:

“*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling*. Dengan cara pengambilan sampel yang digunakan menggunakan Sampel Jenuh.

Menurut Sugiyono (2014:86) definisi sampel jenuh adalah sebagai berikut:

“Sampel Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”.

## **1.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Sumber Data**

Pada peneliti ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara).

Menurut Sugiyono (2017:193) definisi data primer adalah sebagai berikut:

“Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data”.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.

#### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2017:137) definisi teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

“Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian”.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil menyebarkan kuesioner kepada *Account Representative (AR)* dan seksi P3 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*Field Research*). Untuk memperoleh



langsung informasi serta hasil penelitian. Maka untuk memperoleh data dan informasi metode penelitian lapangan yang digunakan peneliti adalah Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini. Kuesioner akan dibagikan kepada responden yaitu *Account Representative* dan seksi P3 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Cibitung dan Bekasi Utara.

## **1.5 Metode Analisis Data**

### **1.5.1 Analisis Data**

Untuk menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah dirumuskan maka data yang dapat dikumpulkan atau diperoleh harus dianalisis. Analisis data dalam penelitian merupakan salah satu kegiatan peneliti berupa proses penyusunan dan pengelolaan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh untuk mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data yang dianalisis itu hasil dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dilakukan analisa data untuk menarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2017:244) definisi analisis data adalah sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan”.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kuantitatif guna mendapatkan data penelitian. Adapun analisis data yang dilakukan penulis meliputi analisis deskriptif dan analisis verifikatif sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

- a. Menganalisis pemeriksaan pajak
- b. Menganalisis penagihan pajak
- c. Menganalisis Modernisasi perpajakan
- d. Menganalisis kepatuhan wajib pajak

2. Analisis Verifikatif

- a. Menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Menganalisis seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Menganalisis seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan defini diatas, maka analisis data merupakan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data yang terhimpun dari hasil penelitian akan penulis bandingkan antara data yang ada dilapangan dengan data kepustakaan kemudian dilakukan analisa untuk

menarik kesimpulan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sampling, dimana yang diselidiki adalah sampel yang merupakan sebuah himpunan dari pengukuran yang dipilih dari populasi yang menjadi perhatian dan penelitian.
2. Setelah melakukan pengumpulan data dengan cara sampling, kemudian ditentukan instrumen untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. Instrumen yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah daftar pertanyaan atau kuesioner untuk menentukan nilai dari
3. kuesioner tersebut, penulis menggunakan *skala likert*.
4. Daftar kuesioner kemudian disebar ke bagian-bagian yang sudah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Skoring Untuk Jawaban Kuesioner**

Pertanyaan	Skor
Sangat Setuju/Setuju/Selalu/Sangat Sesuai	5
Setuju/Sering/Sesuai	4
Ragu-Ragu/Kadang-Kadang/Netral	3
Tidak Setuju/Hampir Tidak Pernah/Tidak Sesuai	2
Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Sangat Tidak Sesuai	1

5. Apabila data terkumpul, kemudian akan dilakukan pengelolaan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel pemeriksaan pajak ( $X_1$ ), penagihan pajak ( $X_2$ ) dan modernisasi perpajakan ( $X_3$ ), maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlah data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden.

menurut Sugiyono (2017:147) definisi deskriptif adalah sebagai berikut:

“Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Untuk menilai variabel X dan variabel Y, maka analisis analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapatkan dengan menjumlahkan dan keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dalam jumlah responden.

Rumus rata-rata (*mean*) yang dikutip oleh Sugiyono (2015 :280) adalah sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan:

Me = *Mean* (rata-rata)

$\sum$  = *Epsilon* (baca jumlah)

$X_i$  = Nilai x ke i sampai ke  $n$

$n$  = Jumlah Individu

Setelah rata-rata dari masing-masing variabel didapat, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan tertinggi tersebut peneliti ambil banyaknya pertanyaan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) dan skor tertinggi (5) dengan menggunakan *skala likert*. Teknik *skala likert*, digunakan untuk mengukur jawaban. Untuk menentukan kelas interval, penulis dalam penelitian ini menggunakan rumus  $K = 1 + 3,3 \log n$ . Kemudian rentang data dihitung dengan cara nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah.

#### 1. Pemeriksaan Pajak

Untuk menilai variabel *independen* pemeriksaan pajak, maka analisis yang dipergunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari variabel pemeriksaan pajak. Untuk variabel pemeriksaan pajak ( $X_1$ ) rumusnya adalah:

$$Me = \frac{\sum X}{n}$$

Setelah didapatkan rata-rata, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner adalah 12 pertanyaan, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 12) = 60$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 12) = 12$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{60 - 12}{5} = 9,6$$

Maka, kriteria untuk variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Kriteria Pemeriksaan Pajak**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
Sangat Tidak Sesuai	12 – 21,6
Tidak Sesuai	21,6 – 31,2
Kurang Sesuai	31,2 – 40,8
Sesuai	40,8 – 50,4
Sangat Sesuai	50,4 – 60

## 2. Penagihan Pajak

Untuk menilai variabel *independent* penagihan pajak, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari variabel penagihan pajak. Untuk variabel Penagihan Pajak ( $X_2$ ) rumusnya adalah:

$$Me = \frac{\sum X}{n}$$

Setelah didapatkan rata-rata, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner adalah 10 pertanyaan, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 10) = 50$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 10) = 10$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{50 - 10}{5} = 8$$

Maka, kriteria untuk variabel Penagihan Pajak ( $X_2$ ) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Kriteria Penagihan Pajak**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
Tidak Baik	10 – 18
Kurang Baik	18 – 26
Cukup Baik	26 – 34
Baik	34 – 42
Sangat Baik	42 – 50

### 3. Modernisasi Perpajakan

Untuk menilai variabel *independent* Modernisasi Perpajakan, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari variabel Modernisasi Perpajakan.

Untuk variabel Modernisasi Perpajakan ( $X_3$ ) rumusnya adalah:

$$\text{Me} = \frac{\sum X}{n}$$

Setelah didapatkan rata-rata, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner adalah 12 pertanyaan, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 12) = 60$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 12) = 12$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{60 - 12}{5} = 9,6$$

Maka, kriteria untuk variabel Modernisasi Perpajakan ( $X_3$ ) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.10**

**Kriteria Modernisasi Perpajakan**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
Sangat Tidak Modern	12 -21,6
Kurang Modern	21,6 – 31,2
Cukup Modern	31,2 – 40,8
Modern	40,8 – 50,4
Sangat Modern	50,4 – 60

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menilai variabel *dependent* Kepatuhan Wajib Pajak, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) rumusnya adalah:



$$Me = \frac{\sum Y}{n}$$

Setelah didapatkan rata-rata, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan dengan banyaknya pertanyaan dalam kuesioner adalah 10 pertanyaan, sehingga:

$$\text{Nilai tertinggi} = (5 \times 10) = 50$$

$$\text{Nilai terendah} = (1 \times 10) = 10$$

Dengan perhitungan kelas interval sebagai berikut:

$$\frac{50 - 10}{5} = 8$$

Maka, kriteria untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11**

**Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Kriteria</b>
Tidak Patuh	10 – 18
Kurang Patuh	18 – 26
Cukup Patuh	26 – 34
Patuh	34 – 42
Sangat Patuh	42 – 50

## 1.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian merupakan hal yang utama dalam meningkatkan efektifitas proses pengumpulan data. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliable (*reliable*), yang artinya alat ukur unuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

### 1.5.2.1 Uji Validitas Instrumen

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah.

Menurut Sugiyono (2017:121) definisi uji validitas adalah sebagai berikut:

“Uji validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”.

Menurut Sugiyono (2017:134) untuk menguji validitas pada tiap-tiap item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan

jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar validitas yang berlaku sebagai berikut:

- a. Jika  $r \geq 0,30$ , maka item instrumen dinyatakan valid
- b. Jika  $r \leq 0,30$ , maka item instrumen dinyatakan tidak valid

Untuk menghitung rumus korelasi pada uji validitas instrumen dapat menggunakan metode *Pearson Product Moment* dengan rumus ebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi

$\sum XY$  = Jumlah perkalian variabel X dan Y

$\sum X$  = Jumlah nilai variabel X

$\sum Y$  = Jumlah nilai variabel Y

$\sum X^2$  = Jumlah pangkat dua dari nilai variabel X

$\sum Y^2$  = Jumlah pangkat dua dari nilai variabel Y

$n$  = Banyaknya sampel

### 1.5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability*, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel (*reliable*). Meskipun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti kepercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan *cronbach's alpha*. Yang penulis kutip dari Eti Rochaety (2007:54) dengan menggunakan *software* SPSS. Pemberian interpretasi terhadap reliabilitas variabel dapat dikatakan reliabel (*reliable*) jika koefisien variabelnya lebih dari 0,6 yang dirumuskan sebagai berikut:

$$a = \frac{k}{k-1} \left( 1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right)$$

Keterangan:

$k$  = Jumlah soal atau pertanyaan

$\sigma_i^2$  = Variansi setiap pertanyaan

$\sigma_x^2$  = Variasi total tes

$\sum \sigma_i^2$  = Jumlah seluruh variansi setiap soal atau pertanyaan

### 1.5.3 Transformasi Data Ordinal Menjadi Data Interval

Mentransformasikan data dari ordinal ke interval gunanya untuk memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik yang mana data setidaknya berskala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Menurut Sambas Ali Muhidin (2011:28) definisi *Method of Successive Interval* (MSI) adalah sebagai berikut:

“*Method of Successive Interval* (MSI) adalah merubah data ordinal menjadi skala interval berurutan”.

*Method of Successive Interval* (MSI) adalah sebagai berikut:

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia
2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden ( $n$ ), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternatif jawaban responden tersebut
3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawaban responden
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, hitung nilai  $z$  untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternatif jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai  $z$  dengan menggunakan rumus:

$$SV = \frac{(\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas})}{(\text{area dibawah batas atas} - \text{area dibawah batas bawah})}$$

6. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus:

$$Y = S_{vi} + [SV_{\min}]$$

Mengubah *Scala Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scaled Value* (TSV).

## 1.6 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

### 1.6.1 Rancangan Analisis

Rancangan analisis digunakan untuk mengetahui korelasi dari empat variabel yang diteliti, dalam lingkup penelitian pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah dengan perhitungan statistik. Dalam menganalisis dan melakukan uji hipotesis, perlu adanya suatu rancangan dalam pengolahan data dari instrumen yang digunakan. Berikut merupakan uraian dari langkah-langkah dalam rancangan analisis dan uji hipotesis.

## 1.6.2 Rancangan Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yang perlu diuji kebenarannya dalam suatu penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari kedua variabel yang diteliti. Tahap-tahap dalam rancangan pengujian hipotesis ini dimulai dengan penetapan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Pemilihan tes statistik, perhitungan nilai statistik dan penetapan tingkat signifikan.

### 1.6.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi yang bermanfaat untuk meramal nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan mencari kemungkinan kesalahan dan menganalisa hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun parsial.

Menurut Sugiyono (2014:277) menjelaskan bahwa analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

“Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasinya (dinaik-turunkannya)”.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Secara fungsional persamaan regresi kedua variabel independen yang diteliti, yaitu Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) dan Modernisasi Perpajakan ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

$Y$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_0$  = Nilai bilangan konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi/koefisien pengaruh  $X_1, X_2 X_3$

$X_1$  = Pemeriksaan Pajak

$X_2$  = Penagihan Pajak

$X_3$  = Modernisasi Perpajakan



### 1.6.2.2 Uji Korelasi Ganda

Untuk menghitung keeratan hubungan atau koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y, dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan analisis koefisien korelasi *spearman's rho*. Rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan:

$r_s$  = Koefisien korelasi *Rank Spearman* yang menunjukkan keeratan hubungan antara unsur-unsur variabel X dan Variabel Y

$d_i$  = Selisih mutlak antara rangking data variabel X dan variabel Y ( $X_1 - Y_1$ )

$n$  = Banyaknya responden atau sampel yang diteliti

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien koerelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat disimpulkan pada ketentuan-ketentuan untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi diantaranya yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.12**

#### **Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi**

<b>Interval Koefisien</b>	<b>Tingkat Hubungan</b>
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah

0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2017:184)

### 1.6.3 Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Uji signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial menggunakan uji T dan secara simultan menggunakan uji F.

#### 1.6.3.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji $t$ )

Uji statistik  $t$  disebut juga sebagai uji signifikan individual dimana uji ini menunjukkan beberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujianya adalah:

$$H_0 : r = 0 \text{ atau } H_a : r \neq 0$$

Keterangan:

$H_0$  = Format hipotesis awal (Hipotesis nol)

$H_a$  = Format hipotesis alternatif

#### 1. Penetapan Hipotesis Statistik

a. Variabel Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )

$H_0 : px_1 \leq 0$ , artinya, Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_a : px_1 > 0$ , artinya, Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Variabel Penagihan Pajak ( $X_2$ )

$H_0 : px_2 \leq 0$ , artinya, Penagihan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_a : px_2 > 0$ , artinya, Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Variabel Modernisasi Perpajakan ( $X_3$ )

$H_0 : px_3 \leq 0$ , artinya, Modernisasi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

$H_a : px_3 > 0$ , artinya, Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Pengujian nilai tes statistik

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan *product moment*. Rumus untuk mengukur koefisien *product moment* menurut Sugiyono (2017:183) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X \cdot \sum Y)}{\sqrt{\{(n \sum X^2 - (\sum X^2))\{n \sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi

$\sum XY$  = Jumlah perkalian variabel X dan Y

$\sum X$  = Jumlah nilai variabel X

$\sum Y$  = Jumlah nilai variabel Y

$\sum X^2$  = Jumlah pangkat dua dari nilai variabel X

$\sum Y^2$  = Jumlah pangkat dua dari nilai variabel Y

$n$  = Banyaknya sampel

Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *software IBM SPSS Statistic 25* agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat. Selanjutnya untuk mencari nilai  $t$  hitung menurut Sugiyono (2017:184) maka pengujian tingkat signifikannya adalah dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{(1 - r^2)}}$$

Keterangan:

$t$  = Tingkat signifikan ( $t$  Hitung) yang selanjutnya dibandingkan dengan ( $t$  Tabel)

$r$  = Koefisien korelasi

$n$  = Banyaknya sampel

Kemudian menentukan model keputusan dengan menggunakan statistik uji  $t$ , dengan melihat asumsi sebagai berikut:

- a. Interval keyakinan  $\alpha = 0,05$
- b. Derajat kebebasan  $= n - 2 = n - k - 1$  dimana  $k$  adalah jumlah variabel
- c. Dilihat hasil ( $t$  Tabel)

Hasil hipotesis ( $t$  Hitung) dibandingkan dengan ( $t$  Tabel) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh)
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh).

### 1.6.3.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Menurut Damodar N Gujarati (2012:172) untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut:

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Keterangan:

$Kd$  = Koefisien determinasi

*Zero Order* = Koefisien korelasi

$\beta$  = Koefisien beta

Sementara itu R adalah koefisien korelasi majemuk yang mengukur tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan semua variabel independen yang menjelaskan secara bersama-sama dan nilainya selalu positif. Selanjutnya untuk melakukan pengujian koefisien determinasi (*adjustedR<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengukur proporsi atau presentase sumbangan variabel dependen.

Menurut V. Wiratma Sujarweni (2012:188) mengemukakan sebagai berikut:

“Untuk melihat seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan digunakan determinasi (KD)”.

rumus determinasi sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

$Kd$  = Koefisien Determinasi

$r$  = Koefisien korelasi

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Hal ini berarti  $R^2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila *adjustedR<sup>2</sup>* semakin besar mendekati

1 maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila *adjustedR*<sup>2</sup> semakin kecil bahkan mendekati nol, maka dapat dikatakan semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel independen.

### **1.7 Rancangan Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang ia ketahui

Kuesioner ini dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Rancangan kuesioner yang dibuat oleh penulis adalah kuesioner tertutup dimana jawaban dibatasi atau sudah ditentukan oleh penulis, jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Kuesioner terdiri dari 44 pertanyaan yaitu 12 pertanyaan mengenai Pemeriksaan Pajak, 10 pertanyaan mengenai Penagihan Pajak, 12 pertanyaan mengenai Modernisasi Perpajakan dan 10 pertanyaan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.

